DINAMIKA KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PULAU KALIMANTAN: PENDEKATAN ANALISIS DATA PANEL

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana

SYARIFAH MASYITAH HUMAIRA ALAYDRUS
NIM. B1013191030

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama	:	Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
NIM	:	B1013191030
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Dinamika Kemiskinan di Wilayah Perkotaan Pulau Kalimantan: Pendekatan Analisis Data Panel

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 02 September 2026



Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
NIM. B1013191030

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama	:	Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
NIM	:	B1013191030
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Dinamika Kemiskinan di Wilayah Perkotaan Pulau Kalimantan: Pendekatan Analisis Data Panel

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 02 September 2026



Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
NIM. B1013191030

LEMBAR YURIDIS

Dinamika Kemiskinan Di Wilayah Perkotaan Pulau Kalimantan:
Pendekatan Analisis Data Panel

Penanggung Jawab Yuridis

Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
NIM. B1013191030

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 04 Februari 2026

Majelis Penguji

No	Majelis Penguji	Nama/ NIP	Tgl/ Bln/ Thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing	Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si. NIP. 196212291988101001	25/5/2026	
2	Ketua Penguji	Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si. NIP. 196211201989032003	22/5/2026	
3	Anggota Penguji	Supriaman, S.Pd., M.Si. NIP. 199104132023211027	11/5/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 09 SEP 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul "Dinamika Kemiskinan di Wilayah Perkotaan Pulau Kalimantan: Pendekatan Analisis Data Panel" yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari penyusunan Tugas Akhir ini tidak mungkin selesai dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur pada diri sendiri dan setiap hati yang pernah menjadi bagian dari perjalanan ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Hj. Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Metasari Kartika, S.E., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Yanto, S.E., M.Sc., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan dan nasehat sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.

7. Ibu Dr. Yalina Yacoub, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji (Ketua Penguji) yang telah memberikan arahan dan nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Supriaman, S.Pd., M.Si., sebagai Dosen Penguji (Anggota Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Terima kasih untuk kedua orang tuaku, Abah dan Umi. Jauh sebelum penulis mengerti bagaimana mengejar cita-cita, kalian lebih dulu mengajarkan arti perjuangan melalui kehidupan. Banyak hal yang tidak mampu penulis balas dengan apapun, waktu yang diberikan, lelah yang disembunyikan, serta doa-doa yang terus mengiringi setiap langkah. Semoga pencapaian kecil ini menjadi salah satu alasan untuk tersenyum dan merasa bahwa segala yang telah diberikan selama ini tidak pernah sia-sia. Semoga sepanjang hidup, penulis tidak pernah berhenti berusaha menjadi alasan bagi Abah dan Umi untuk bangga. Juga untuk adikku tersayang, terima kasih kehadiran dan dukungan kecil yang sederhana tetapi berarti. Semoga kita bisa saling membanggakan dengan cara masing-masing.
10. Teruntuk Syarif Ali, seseorang yang selalu ada dalam segala hal dan situasi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini dengan caramu sendiri. Banyak waktu, bantuan, kesabaran, dan kesediaanmu. Tempat bercerita paling nyaman dan aman, juga tempat beristirahat ketika lelah. Tidak semua kebaikanmu dapat tertuliskan di sini, tetapi penulis tahu banyak bagian dari perjalanan ini menjadi lebih mudah karena ada kamu. Jika skripsi ini menjadi penanda satu perjalanan telah selesai, maka salah satu hal yang penulis syukuri pernah melewati prosesnya denganmu.
11. Kesayanganku: Cats Que. Jack, Witi, Piti, Cumut, Miki, Pusi, Jupiter, Mimi, Cuni, Poni, Cipi, Upi, Orena, Batman, Cumi, Ogi, Oreo, Ubi, Ebi. Senang rasanya punya kalian di rumah yang selalu menjadi moodbooster di situasi apapun.
12. Genk Hayuk, dimulai dengan satu kata: hayuk. Fery Ramadhan, Yulianus Soo Wea, Misbahul Munir, Verlia Angrany. Terima kasih telah menemani perjalanan sejak langkah pertama sebagai mahasiswa baru, kita tumbuh dan berjuang bersama. Kalian hadir di masa yang tidak akan pernah terulang.

setiap kebersamaan, cerita, tawa dan keluh kesah. Semoga menjadi satu kenangan indah.

13. Genk Mandiri, Siti Jubaidah dan Ana Estarti. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan di bab terakhir perjalanan ini. Kerepotan yang dilalui, saling mengingatkan, dan menemani proses yang mungkin terasa melelahkan jika dijalani sendiri. Semoga langkah perjuangkan bersama ini menjadi awal dari banyak hal baik yang menanti di depan.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan Tugas Akhir, sebagai penambahan dan pengembangan wawasan. Penulis menyadari Tugas Akhir ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran kritik yang membangun guna tercapainya kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 04 September 2026
Peneliti,



Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
NIM. B1013191030

POVERTY DYNAMICS IN URBAN AREAS OF KALIMANTAN: A PANEL DATA ANALYSIS APPROACH

Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
Tanjungpura University, Indonesia

ABSTRACT

Poverty remains a fundamental problem in development in Indonesia, including in urban areas of Kalimantan Island. Various factors are believed to influence poverty levels, including education, labor force size, and regional minimum wages. This study aims to analyze the effect of average length of schooling, labor force, and regional minimum wage on poverty levels in urban areas of Kalimantan Island. The research method uses a quantitative approach with panel data regression analysis. Data were obtained from publications by the Central Statistics Agency (BPS) with cities in Kalimantan as the unit of analysis. The model was selected through a series of tests, resulting in the Random Effect Model (REM) as the best model. The results show that average length of schooling is negatively related to poverty, although not yet significantly. This indicates that improving education has the potential to reduce poverty through improving the quality of human resources. The number of workers, on the other hand, has a positive relationship with poverty, indicating that labor force growth is not accompanied by the availability of productive jobs. Meanwhile, the regional minimum wage has been proven to have a significant negative effect on poverty, meaning that an increase in the minimum wage plays an important role in increasing the purchasing power of the poor. Simultaneously, education, labor force size, and regional minimum wage significantly affect poverty in urban areas of Kalimantan Island. This study concludes that poverty alleviation needs to be carried out through a multidimensional strategy, which includes improving the quality of education, creating productive jobs, and implementing fair and sustainable wage policies.

Keywords: Poverty; Average Length of Schooling, Labor Force, Regional Minimum Wage, Panel Data

DINAMIKA KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PULAU KALIMANTAN: PENDEKATAN ANALISIS DATA PANEL

Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan Pulau Kalimantan. Berbagai faktor diyakini mempengaruhi tingkat kemiskinan, antara lain faktor pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan Pulau Kalimantan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan unit analisis kota di wilayah Pulau Kalimantan. Pemilihan model dilakukan melalui serangkaian uji sehingga diperoleh *Random Effect Model (REM)* sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berhubungan negatif dengan kemiskinan, meskipun belum signifikan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pendidikan berpotensi menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja justru memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan tenaga kerja tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja produktif. Sementara itu, upah minimum regional terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti kenaikan upah minimum berperan penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Secara simultan, pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di perkotaan Pulau Kalimantan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui strategi multidimensi, yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta kebijakan upah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kemiskinan; Rata-Rata Lama Sekolah; Jumlah Tenaga Kerja; Upah Minimum Regional; Data Panel

DINAMIKA KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PULAU KALIMANTAN: PENDEKATAN ANALISIS DATA PANEL

Oleh: Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk kawasan perkotaan. Kemiskinan menggambarkan situasi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, antara lain sandang, pangan, dan kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2023). Secara umum kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksebilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Yacoub & Apriani, 2019).

Wilayah perkotaan di Kalimantan, seperti Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, dan Samarinda, mengalami pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor industri, perdagangan, dan pertambangan (Kementerian Keuangan, 2022). Dari perspektif ekonomi, disparitas upah, minimnya kesempatan kerja di sektor formal, dan tingginya ketergantungan terhadap sektor informal menjadi faktor penyebab kemiskinan (Suryahadi dkk, 2020). Selain itu, faktor lingkungan dan tata kelola pemerintahan turut mempengaruhi tingkat kemiskinan, daerah dengan infrastruktur yang buruk dan layanan publik yang tidak optimal cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (*Asian Development Bank*, 2021).

Kemiskinan menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejumlah faktor, antara lain kesempatan kerja, tingkat pendidikan, dan tingkat upah tenaga kerja, kontribusi terhadap tingkat kemiskinan dan menunjukkan korelasi yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain faktor peluang kerja, pendidikan menjadi penentu utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan keterbatasan pendidikan mendorong individu bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang fluktuatif. (Psacharopoulos & Patrinos, 2018) menemukan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan berpotensi meningkatkan pendapatan individu sebesar 10%, sehingga memperlihatkan urgensi investasi pendidikan dalam mengurangi kemiskinan.

Namun, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di beberapa wilayah yang menghambat mobilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. PERMASALAHAN

Kemiskinan di wilayah perkotaan Pulau Kalimantan tetap menjadi isu yang kompleks meskipun wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri. Beragam faktor, termasuk tingkat pengganggguran, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar, diduga berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji kemiskinan di kota-kota Kalimantan mendorong penelitian ini menganalisis determinan kemiskinan di wilayah perkotaan Pulau Kalimantan, tujuan mengidentifikasi faktor yang berpengaruh serta menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan informasi di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut :

1) Bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan pulau kalimantan?
2) Bagaimana hubungan antara jumlah kerja dan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan pulau kalimantan?
3) Bagaimana tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan pulau kalimantan dipengaruhi oleh upah tenaga kerja?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan pulau kalimantan.
2) Mengidentifikasi pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan pulau kalimantan.
3) Menentukan hubungan antara upah tenaga kerja dan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan pulau kalimantan.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang memakai paradigma positivisme untuk mengolah data sehingga menjadi bahan analisis statistik. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sekumpulan angka untuk menghasilkan data, dan penggunaan data dianalisis melalui pendekatan statistik guna membuktikan atau menolak hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan pada 9 Kota di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda serta pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan

software Eviews 12. Taraf signifikansi yang digunakan untuk menguji data penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat *(dependen)* adalah Persentase Kemiskinan Perkotaan (Y) serta variabel bebas *(independent)* adalah Tingkat Pendidikan (X_1), Jumlah Tenaga Kerja (X_2), dan Upah Pekerja (X_3).

5. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan model terbaiknya adalah *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa data yang terdapat di dalam penelitian ini terdistribusi normal dan terbebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Secara parsial variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan, serta variabel upah minimum regional beperngaruh negatif dan signifikan. Sedangkan secara simultan variabel rata-rata lama skeolah, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 29,06%.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan Pulau Kalimantan, dapat dibuat beberapa kesimpulan utama: (1) Temuan menunjukkan korelasi negatif antara pendidikan dan tingkat kemiskinan yang ditunjukkan oleh masa sekolah rata-rata. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. (2) Jumlah tenaga kerja belum menunjukkan kontribusi positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan jumlah tenaga kerja justru berpotensi memperparah kondisi kemiskinan apabia tidak disertai penyediaan lapangan kerja produktif yang memadai. Keterbatasan penyerapan tenaga kerja di sektor formal menyebabkan sebagian masyarakat bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. (3) Upah minimum regional memiliki peranan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Kenaikan upah minimum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memperbaiki kesejahteraan rumah tangga, dan membantu menurunkan jumlah penduduk miskin. (4) Secara umum, pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum merupakan determinan penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan Kalimantan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dirancang melalui pendekatan multidimensional yang mencakup peningkatan

mutu pendidikan, perluasan kesempatan kerja, serta penerapan kebijakan pengupahan yang adil dan berkeadilan. (5) Faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, akses kesehatan, dan kebijakan sosial juga berperan besar dalam memengaruhi kemiskinan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan: (1) Pemerintah perlu memperbaiki mutu serta pemerataan pendidikan agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntunan dunia kerja. Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. (2) Perlu adanya penciptaan lapangan kerja baru yang produktif, terutama di sektor-sektor padat karya dan UMKM. Dengan cara ini, jumlah tenaga kerja yang terus bertambah dapat terserap dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan. (3) Kebijakan upah minimum harus terus diperhatikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Kenaikan upah yang sejalan dengan produktivitas membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan beban berlebih bagi dunia usaha. (4) Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu dan multidimensi. Selain pendidikan, tenaga kerja, dan upah, perlu juga memperhatikan aspek lain seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, serta program perlindungan sosial agar upaya pengurangan kemiskinan lebih efektif. (5) Penelitian selanjutnya disarankan unutk memasukkan faktor-faktor tambahan yang turut mempengaruhi kemiskinan, sehingga temuan di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan kemiskinan beserta alternatif solusinya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **i**
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iii**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**
ABSTRACT ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
RINGKASAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

1. PENDAHULUAN **3**
2. KAJIAN LITERATUR **7**
2.1 Tinjauan Teori 7
2.1.1 Teori Struktural Kemiskinan *(Structural Poverty Theory)* 7
2.2 Kajian Empiris 9
2.3 Penelitian Terdahulu dan Relevan 10
2.3.1 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan 11
2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan 12
2.3.3 Pengaruh Upah Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan 12
2.4 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 12
2.4.1 Kerangka Konseptual 12
2.4.2 Hipotesis Penelitian 13
3. METODE PENELITIAN **13**
3.1 Metode Analisis Data 15
3.1.1 Analisis Regresi Data Panel 15
3.1.2 Metode Persamaan 15
3.2 Teknik Analisa Data 16
3.2.1 Uji Pemilihan Model Terbaik dan Uji Asumsi Klasik 16
3.2.2 Uji Hipotesis 16
3.2.3 Uji Parsial (Uji T) 16
3.2.4 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 17
3.2.5 Uji Koefisien Determinasi 17
4. HASIL DAN PEMBAHASAN **17**
4.1 Hasil Penelitian 17
4.1.1 Uji Pemilihan Model Data Panel 17
4.1.2 Uji Asumsi Klasik 18
4.1.2.1 Uji Multikolinearitas 18
4.1.2.2 Uji Heterokedastisitas 18
4.1.2.3 Uji Normalitas 19

4.1.2.4 Uji Cross-Section Dependence (CSD) 19
4.1.3 Pengujian Regresi Data Panel 20
4.1.4 Pengujian Hipotesis 21
4.1.4.1 Uji F Statistic 21
4.1.4.2 Uji Determinasi 22
4.1.4.3 R-squared 22
4.1.4.4 Adjusted R-squared 22
4.2 Pembahasan Penelitian 23
4.2.1 Pendidikan (RRLS) dan Kemiskinan 23
4.2.2 Jumlah Tenaga Kerja (TK) dan Kemiskinan 24
4.2.3 Upah Minimum Regional (UMR) dan Kemiskinan 25
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 27
5.1 Kesimpulan 27
5.2 Rekomendasi 28

DAFTAR PUSTAKA 29
LAMPIRAN 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Persentase Penduduk Miskin di 5 Provinsi Pulau Kalimantan dari Tahun 2020 hingga 2025 4

Tabel 2. Tingkat Persentase Penduduk Miskin di 9 Kota Pulau Kalimantan dari Tahun 2020 hingga 2025..... 5

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi di 5 Provinsi Pulau Kalimantan dari Tahun 2019 hingga 2024..... 6

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 14

Tabel 5. Output Hasil Estimasi Model..... 17

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 18

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas..... 18

Tabel 8. Hasil Uji Cross-Section Dependence (CSD) 19

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) 20

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis secara Simultan (Uji f) 21

Tabel 11. Analisis Koefisien Determinasi (R^2 dan Adjusted R^2)..... 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual 13
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Penelitian	33
Lampiran 2	Hasil Uji Chow	34
Lampiran 3.	Hasil Uji Hausman	34
Lampiran 4.	Hasil Uji Lagrange Multiplier	35
Lampiran 5.	Hasil Uji Multikolinearitas	35
Lampiran 6.	Hasil Uji Heterokedastisitas	35
Lampiran 7.	Hasil Uji Normalitas	36
Lampiran 8.	Regresi Data Panel	36

DINAMIKA KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PULAU KALIMANTAN: PENDEKATAN ANALISIS DATA PANEL

[1] Syarifah Masyitah Humaira Alaydrus
Universitas Tanjungpura, Indonesia

[2]Dr. Akhmad Yani, S.E. M.Si.
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Poverty remains a fundamental problem in development in Indonesia, including in urban areas of Kalimantan Island. Various factors are believed to influence poverty levels, including education, labor force size, and regional minimum wages. This study aims to analyze the effect of average length of schooling, labor force, and regional minimum wage on poverty levels in urban areas of Kalimantan Island. The research method uses a quantitative approach with panel data regression analysis. Data were obtained from publications by the Central Statistics Agency (BPS) with cities in Kalimantan as the unit of analysis. The model was selected through a series of tests, resulting in the Random Effect Model (REM) as the best model. The results show that average length of schooling is negatively related to poverty, although not yet significantly. This indicates that improving education has the potential to reduce poverty through improving the quality of human resources. The number of workers, on the other hand, has a positive relationship with poverty, indicating that labor force growth is not accompanied by the availability of productive jobs. Meanwhile, the regional minimum wage has been proven to have a significant negative effect on poverty, meaning that an increase in the minimum wage plays an important role in increasing the purchasing power of the poor. Simultaneously, education, labor force size, and regional minimum wage significantly affect poverty in urban areas of Kalimantan Island. This study concludes that poverty alleviation needs to be carried out through a multidimensional strategy, which includes improving the quality of education, creating productive jobs, and implementing fair and sustainable wage policies.

Keywords: Poverty; Average Length of Schooling, Labor Force, Regional Minimum Wage, Panel Data.

[1]syarifahmasyitah@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan Pulau Kalimantan. Berbagai faktor diyakini mempengaruhi tingkat kemiskinan, antara lain faktor pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan Pulau Kalimantan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan unit analisis kota di wilayah Pulau Kalimantan. Pemilihan model dilakukan melalui serangkaian uji sehingga diperoleh *Random Effect Model (REM)* sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berhubungan negatif dengan kemiskinan, meskipun belum signifikan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pendidikan berpotensi menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja justru memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan tenaga kerja tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja produktif. Sementara itu, upah minimum regional terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti kenaikan upah minimum berperan penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Secara simultan, pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di perkotaan Pulau Kalimantan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui strategi multidimensi, yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta kebijakan upah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan; Rata-Rata Lama Sekolah; Jumlah Tenaga Kerja; Upah Minimum Regional; Data Panel.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk kawasan perkotaan. Kemiskinan menggambarkan situasi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, antara lain sandang, pangan, dan kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2023). Secara umum kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksebilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Yacoub & Apriani, 2019).

Wilayah perkotaan di Kalimantan, seperti Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, dan Samarinda, mengalami pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor industri, perdagangan, dan pertambangan (Kementerian Keuangan, 2022). Dari perspektif ekonomi, disparitas upah, minimnya kesempatan kerja di sektor formal, dan tingginya ketergantungan terhadap sektor informal menjadi faktor penyebab kemiskinan (Suryahadi dkk, 2020). Selain itu, faktor lingkungan dan tata kelola pemerintahan turut mempengaruhi tingkat kemiskinan, daerah dengan infrastruktur yang buruk dan layanan publik yang tidak optimal cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (Asian Development Bank, 2021).

Pengangguran, keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan (World Bank, 2022). Selain itu, urbanisasi yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga memicu munculnya kawasan permukiman kumuh dan memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat miskin di kota-kota besar Kalimantan (Bappenas, 2023).

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan mengurangi kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan, mengingat tingkat kemiskinan di beberapa wilayah perkotaan Kalimantan tetap tinggi (Suryahadi, 2020). Akibatnya, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk menemukan faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan di daerah perkotaan Pulau Kalimantan.

Kemiskinan menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejumlah faktor, antara lain kesempatan kerja, tingkat pendidikan, dan tingkat upah tenaga kerja, kontribusi terhadap tingkat kemiskinan dan menunjukkan korelasi yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain faktor peluang kerja, pendidikan menjadi penentu utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan keterbatasan pendidikan mendorong individu bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang fluktuatif. (Psacharopoulos & Patrinos, 2018) menemukan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan berpotensi meningkatkan pendapatan individu sebesar 10%, sehingga memperlihatkan urgensi investasi pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Namun, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di beberapa wilayah yang menghambat mobilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Faktor lain yang juga signifikan adalah besaran upah tenaga kerja, di mana upah yang rendah tidak hanya menurunkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperparah kondisi kemiskinan. Di beberapa daerah, upah minimum regional (UMR) masih belum mampu mencukupi kebutuhan hidup layak, sehingga banyak pekerja tetap berada di bawah garis kemiskinan meskipun memiliki pekerjaan tetap. Menurut laporan BPS (2023), terdapat korelasi positif antara kenaikan upah minimum dengan penurunan angka kemiskinan, terutama di sektor industri dan jasa. Namun, perbedaan standar upah antarwilayah juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan, sehingga memerlukan kebijakan yang lebih adil dan merata.

Tabel 1. Tingkat Persentase Penduduk Miskin di 5 Provinsi Pulau Kalimantan dari Tahun 2020 hingga 2025

Tahun	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara
2020	6,10	7,17	4,82	4,38	6,80
2021	6,54	7,15	5,16	4,83	7,36
2022	6,31	6,73	5,28	4,49	6,77
2023	6,11	6,71	5,11	4,29	6,45
2024	5,78	6,32	5,17	4,11	6,32
2025	5,17	6,11	5,19	3,84	5,54
Rata-rata	6,00	6,69	5,12	4,32	6,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Angka kemiskinan 5 provinsi di Pulau Kalimantan mengalami tren berbeda-beda sepanjang tahun 2020 hingga 2025. Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan rata-rata 6,69%, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 7,17% pada 2020 menjadi 6,11% pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam perekonomian atau kebijakan sosial yang mulai berdampak.

Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat angka kemiskinan yang cukup tinggi, dengan rata-rata 6,54%. Tahun 2021 menjadi puncak tertinggi dengan 7,36%,

sebelum akhirnya mengalami penurunan menjadi 5,54% pada 2023.

Sementara itu, Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki tingkat kemiskinan yang relatif stabil dengan rata-rata 6,00%, sempat mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 6,54%, sebelum kembali menurun di tahun-tahun berikutnya.

Rata- rata tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah (Kalteng) selama lima tahun terakhir mencapai 5,12% lebih rendah dibandingkan Kalbar dan Kaltara. Tingkat kemiskinan provinsi ini bergerak dalam kisaran 4,82% hingga 5,28%, kondisi yang cukup stabil meskipun masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Di sisi lain, Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah, dengan rata-rata 4,32%. Tren kemiskinan di Kalsel terus mengalami penurunan dari 4,38% pada 2019 menjadi 3,84% pada 2023, menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan menunjukkan penurunan setelah mengalami peningkatan pada 2020-2021, kemungkinan besar disebabkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Namun, masih terdapat disparitas yang cukup besar antarprovinsi, di mana Kalbar dan Kaltara memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Kalsel. Karena itu, diperlukan kebijakan lebih terarah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di masing-masing daerah, seperti pengangguran, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta urbanisasi yang tidak terkendali. Dengan memahami ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan.

Tabel 2. Tingkat Persentase Penduduk Miskin di 9 Kota Pulau Kalimantan dari Tahun 2020 hingga 2025

Wilayah Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata
Pontianak	4,70	4,58	4,46	4,45	4,20	4,00	4,39
Singkawang	4,53	4,83	4,67	4,70	4,53	4,28	4,59
Palangka Raya	3,44	3,75	3,61	3,44	3,52	3,62	3,56
Banjarmasin	4,39	4,89	4,74	4,63	4,58	4,52	4,62
Banjar Baru	4,01	4,40	4,17	3,92	3,79	3,44	3,95
Tarakan	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56	5,03	5,99
Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23	1,97	2,40
Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,81	4,30	3,45	4,52
Bontang	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74	3,21	4,10

Sumber: BPS, 2025.

Tingkat kemiskinan berbagai kota di Pulau Kalimantan menunjukkan variasi selama periode 2020 hingga 2025. Balikpapan adalah kota dengan kemiskinan terendah, rata-rata 2,40%. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada 2021 sebesar 2,89%, angka tersebut kembali menurun hingga 2,23% pada 2024, menunjukkan stabilitas ekonomi cukup baik. Palangka Raya juga termasuk kota dengan tingkat kemiskinan rendah, dengan rata- rata 3,56%, meskipun sempat meningkat pada 2021 menjadi 3,75% sebelum kembali menurun.

Sementara itu, Tarakan mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, dengan rata-rata 5,99%. Peningkatan terjadi pada 2021 dengan angka mencapai 6,71%, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19, sebelum akhirnya menurun di tahun-tahun berikutnya.

Beberapa kota menunjukkan tren penurunan kemiskinan, seperti Pontianak dan Banjarbaru. Di Pontianak, angka kemiskinan menurun dari 4,70% pada 2020 menjadi 4,00% pada 2025, dengan rata-rata 4,39%. Banjarbaru juga mengalami tren serupa, di mana angka kemiskinan turun dari 4,01% pada 2020 menjadi 3,44% pada 2025, dengan rata-rata 3,95%.

Kota lain seperti Singkawang, Banjarmasin, Samarinda, dan Bontang menunjukkan angka kemiskinan yang relatif stabil selama lima tahun terakhir, dengan fluktuasi kecil di beberapa tahun tertentu. Namun, terdapat pula kota yang mengalami tren peningkatan kemiskinan, seperti Banjarmasin dan Samarinda. Di Banjarmasin, tingkat kemiskinan meningkat dari 4,39% pada 2020 menjadi 4,89% pada 2021, meskipun kemudian mengalami penurunan ke 4,52% pada 2025. Singkawang juga mengalami pola serupa, dengan kenaikan dari 4,53% pada 2020 ke 4,83% pada 2021, sebelum turun sedikit menjadi 4,28% pada 2025.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi di 5 Provinsi Pulau Kalimantan dari Tahun 2019 hingga 2024

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Timur	6,99	2,22	6,06	6,89	4,76	5,48
Kalimantan Barat	6,8	2,21	5,76	6,69	4,75	5,47
Kalimantan Tengah	6,2	2,11	5,26	6,09	4,65	5,37
Kalimantan Selatan	6,4	2,12	5,46	6,29	4,66	5,38
Kalimantan Utara	6,5	2,13	5,56	6,39	4,67	5,39

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Kalimantan beberapa tahun terakhir, dapat dilihat perkembangan ekonomi di kawasan tersebut cenderung mengalami dinamika yang serupa. Pada awal periode pengamatan, seluruh

provinsi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif baik. Namun periode berikutnya terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di semua provinsi. Setelah itu, perekonomian mulai menunjukkan tanda pemulihan secara bertahap di setiap daerah. Tahun-tahun selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan menunjukkan kondisi yang lebih stabil. Secara umum, provinsi di Kalimantan memiliki pola pergerakan pertumbuhan ekonomi yang hampir sama, di mana penurunan terjadi secara bersamaan, kemudian diikuti proses pemulihan yang relatif merata antar wilayah.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar kota di Kalimantan mengalami penurunan kemiskinan, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antarwilayah. Kota dengan tingkat kemiskinan rendah seperti Balikpapan dan Palangka Raya menunjukkan stabilitas ekonomi lebih baik dibandingkan kota seperti Tarakan, yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Faktor ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak menjadi aspek penting dalam mempengaruhi tren kemiskinan di setiap kota. Karena itu, diperlukan kebijakan lebih spesifik dan berbasis data untuk mengatasi disparitas kemiskinan di berbagai kota di Kalimantan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Kemiskinan di wilayah perkotaan Pulau Kalimantan tetap menjadi isu yang kompleks meskipun wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri. Beragam faktor, termasuk tingkat pengganggguran, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar, di duga berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji kemiskinan di kota-kota Kalimantan mendorong penelitian ini menganalisis determinan kemiskinan di wilayah perkotaan Pulau Kalimantan, tujuan mengidentifikasi faktor yang berpengaruh serta menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam mengurangi kemiskinan.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan Kalimantan dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, serta institusi penelitian lainnya, penelitian ini akan mengidentifikasi variabel-variabel utama yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan Kalimantan.